

# FORMULIR PERMOHONAN

Kepada Yth :  
Bapak Wali Kota Medan  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan  
Di\_  
M E D A N

Permohonan ini disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk mendapatkan persetujuan PERUBAHAN IZIN USAHA atas ketentuan yang sebelumnya telah dinyatakan dalam Pendaftaran Penanaman Modal dan seluruh perubahannya.

Nama Perusahaan : PT. ....

Perizinan yang akan diubah : Nomor .....

sebagai berikut :

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI

Alasan perubahan : .....

.....

### III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : *(Direksi/Komisaris/Pimpinan)* dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan *(Nama Perusahaan)* dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
  - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
  - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
  - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

Demikian Surat Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri ini diperbuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi dan keterangan yang diberikan pada permohonan ini dan lampirannya tidak benar, maka kami menyatakan bersedia dibatalkan dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Medan, ....., .....

Pemohon,

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan  
Materai Rp.6.000

(.....)

Nama dan Jabatan

**PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN**

No	LAMPIRAN PERMOHONAN	PETUGAS
<b>I. KETERANGAN PEMOHON</b>		
1.	Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya;	
2.	Rekaman Pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM;	
3.	Rekaman NPWP perusahaan;	
4.	Bukti diri seluruh pemegang saham, berupa:	
	a. Rekaman KTP;	
	b. Rekaman NPWP;	
	c. Dalam hal pemegang saham adalah Perusahaan agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM dan NPWP;	
<b>II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL</b>		
5.	Keterangan rencana kegiatan:	
	a. Untuk industri, berupa diagram alir produksi ( <i>flow chart of production</i> ) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;	
	b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;	
	c. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;	
6.	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan.	
7.	Khusus untuk proyek perluasan dalam bidang usaha industri, melampirkan rekapitulasi kapasitas produksi terhadap jenis produksi barang yang sama (KBLI), di lokasi yang sama atas seluruh persetujuan yang dimiliki oleh perusahaan.	
8.	Dokumen Pendukung lainnya;	
9.	Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan	
<b>III. DALAM HAL TERJADI PERUBAHAN</b>		
10.	Rekaman Perizinan yang dimiliki dan perubahannya.	
11.	LKPM periode laporan terakhir (untuk permohonan yang sebelumnya telah memiliki izin);	
12.	Perubahan Rencana Permodalan :	
	a. Kesepakatan para pemegang saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk : Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan atau Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat ( <i>waarmerking</i> ) oleh Notaris; atau Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notari. Yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang secara tegas mencantumkan posisi kepemilikan saham terakhir yang telah disepakati dengan nilai nominal saham masing-masing para pemegang saham.	
	b. Melampirkan bukti diri para pemegang saham baru, apabila ada;	
	c. Apabila ada perubahan nama pemegang saham, melampirkan <i>certificate change of name</i> atau sejenisnya;	
13.	Perubahan Nama Perusahaan :	
	a. Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan atau Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat ( <i>waarmerking</i> ) oleh Notaris; atau Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notari. Yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang secara tegas mencantumkan posisi kepemilikan saham terakhir yang telah disepakati dengan nilai nominal saham masing-masing para pemegang saham.	
	b. Bukti pemesanan nama Data Isian Akta Notaris (perubahan) dengan status diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM	
14.	Perubahan NPWP : melampirkan Rekaman NPWP Baru	
15.	Perubahan Alamat Perusahaan dan/atau Lokasi Proyek :	
	a. Surat keterangan domisili dan/atau Sertifikat Hak Milik;	
b. Perjanjian sewa menyewa;		
16.	Perubahan Bidang Usaha dan Jenis Produksi :	
	a. Untuk industri, berupa diagram alir produksi ( <i>flow chart of production</i> ) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;	
	b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;	
c. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;		
17.	Perubahan nilai investasi, luas tanah atau tenaga kerja : melampirkan Alasan detil dan jelas mengenai perubahan dari pimpinan perusahaan;	
18.	Perpanjangan masa berlaku :	
19.	a. Bukti progress kegiatan yang dilakukan perusahaan selama ini;	
	b. Alasan detil dan jelas mengenai permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek dari pimpinan perusahaan;	